

# Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Kualitas Pelayanan Kelompok Disabilitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Di NTB

Aisyah<sup>1</sup>, Amil<sup>2</sup>, Yudhi Lestanata<sup>3</sup>, Ilham Zitri<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Corresponding Author: [aisyahsalahudin2@gmail.com](mailto:aisyahsalahudin2@gmail.com)

## Kata Kunci:

Strategi, Bawaslu, Pengawasan, Pelayanan, Penyandang Disabilitas

**Abstrak:** Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada penyelenggaraan Pemilihan Daerah serentak 2020 di NTB merupakan salah satu kewajiban untuk mewujudkan hak pemilu demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan terhadap kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di NTB dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi terhadap kualitas pelayanan kelompok Disabilitas pada penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di NTB. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Badan Pengawas pemilu dalam mengawasi kualitas pelayanan terhadap kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di NTB memiliki tiga aspek. Aspek pertama menentukan formulasi jangka panjang, Aspek kedua pemilihan serangkaian tindakan, Aspek ketiga menentukan alokasi sumber daya, dan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi Badan Pengawas Pemilu yaitu, Faktor komunikasi dan faktor sumber daya.

## Keyword:

Strategy, Bawaslu, Supervision, Services, People with Disabilities

**Abstract:** The strategy of the Election Supervisory Agency in supervising the quality of services for groups with disabilities in the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections in NTB is one of the obligations to realize democratic election rights. This study aims to determine the strategy of the NTB Provincial Election Supervisory Agency in supervising the quality of services for groups with disabilities in the 2020 Simultaneous Regional Elections in NTB and to determine the factors that influence the implementation of strategies for the quality of services for groups with disabilities in the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections in NTB. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study show that the strategy of the Election Supervisory Agency in supervising the quality of services for groups with disabilities in the 2020 Simultaneous Regional Elections in NTB has three aspects. The first aspect determines the long-term formulation, the second aspect selects a series of actions, the third aspect determines the allocation of resources, and shows that the factors that influence the implementation of the Election Supervisory Agency's strategy are communication factors and resource factors.

## PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik utama dari negara demokratis adalah upayanya dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, serta hak-hak sipil lainnya yang melekat pada setiap warga negara tanpa pengecualian. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua warga

negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan, termasuk bagi individu yang memiliki disabilitas, yang sayangnya sering kali diabaikan atau dianggap remeh. Landasan ini juga diakui dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta tertulis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang setara dalam pemilihan dan pencalonan untuk posisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta sebagai penyelenggara pemilu. Ini memberi kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan memperoleh hak politik penuh.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pilihan untuk menggunakan pendekatan penelitian ini dilatarbelakangi oleh niat peneliti untuk mengatasi permasalahan dengan merinci atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Deskripsi ini disusun dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen yang terkait dengan strategi BAWASLU Provinsi NTB dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi kelompok disabilitas selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di NTB. Penelitian kualitatif secara umum digunakan terutama dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, dengan fokus pada analisis mikro. Penelitian ini lebih mendalam terkait pola dan perilaku manusia, serta melibatkan aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini mendasarkan diri pada logika induktif, yang berawal dari pengamatan obyektif dan partisipatif terhadap suatu fenomena sosial (Inalfa, 2023)

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menurut Sugiyono (2019) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Pertama peneliti melakukan reduksi data bertujuan untuk proses penyederhanaan dan penggolongan data, artinya peneliti hanya mengambil data yang diperlukan. Sehingga data yang didapatkan menghasilkan informasi yang yang berguna untuk memudahkan proses terakhir untuk mengambil kesimpulan. Kedua peneliti melakukan penyajian data yaitu proses dalam melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Ketiga peneliti melakukan verifikasi data atau menarik kesimpulan, dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan dari sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, hingga sampai selesai proses menyajikan data.

## PEMBAHASAN

### **Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Kualitas Pelayanan Kelompok Disabilitas Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Di NTB.**

Strategi Bawaslu NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada penyelenggaraa Pilada Serentak 2020 di NTB memiliki tiga aspek antara lain:

1. Aspek pertama adalah menentukan Formulasi jangka panjang Bawaslu NTB yaitu dengan mengidentifikasi potensi peluang dan risiko yang mungkin timbul pada saat penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di NTB, analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, serta penetapan tujuan yang ingin dicapai. Dengan melibatkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan implementasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Temuan penting dari Bawaslu NTB terkait pengawasan kualitas pelayanan bagi kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 mengindikasikan peluang signifikan untuk meningkatkan inklusivitas pemilu melalui kerjasama dengan berbagai organisasi terkait. Peluang ini mencakup kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, dan entitas lainnya yang berfokus pada kesejahteraan dan hak-hak disabilitas. Melalui sinergi ini Bawaslu NTB dapat memperkuat pengawasan dan memastikan pemenuhan hak pilih kelompok disabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemilu. Dari hasil penelitian, diperoleh data yng diperoleh dari divisi pengawasan bawaslu NTB terkait beberapa organisasi yang bekerjasama dengan Bawaslu NTB sebagai berikut:

- a. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Organisasi ini berkomitmen mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas dan partisipasi dalam pemilu.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM berfokus pada isu-isu disabilitas, bekerja sama dengan Bawaslu NTB untuk meningkatkan aksesibilitas pemilu bagi Penyandang disabbilitas.
- c. Komunitas atau organisasi lokal, Organisasi yangn mewakili penyandang disabilitas di tingkat daerah, bekerjaa sama dengan Bawaslu NTB untuk memastikan kebutuhan dan hak merka terpenuhi dalam proses pemilu

Selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, terdapat beberapa temuan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi risiko dan kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi NTB.

- a. TPS yang tidak akses, hal tersebut masih banyak ditemui di beberapa TPS saat pelaksanaan Pilkada di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Tidak aksesnya TPS berupa TPS berada di tempat yang sulit diakses atau tidak bisa dijangkau oleh pemilih difabel,

surat suara untuk pemilih tuna Netra yang rusak atau tidak tersedia, dan tidak adanya jalur khusus bagi pemilih difabel di TPS.

- b. Pemilih difabel yang tidak terdaftar dalam DPT Pilkada Tahun 2020. Ini mengacu pada mengacu pada kelompok penyandang disabilitas yang tidak terinklusi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.
- c. Tidak adanya form pendamping untuk pemilih difabel di beberapa TPS Pendamping tidak dapat menandatangani form pendampingan untuk pemilih penyandang disabilitas.

kesuksesan pilkada serentak 2020 sudah mencapai tahap maksimal ini dikarenakan minimnya terjadi pelanggaran dalam tahapan serta keberlangsungan pilkada, pelayanan yang cukup baik yang diperoleh pemilih disabilitas, tingkat sdm yang sudah encapai tngkat TPS, kemudian tigtat partisipasi masyarakat yang meningkat dibanding pilkada sebelumnya, keamanan dan ketertiban dalam proses pilkada serentak 2020 penerapan protokol kesehatan yang intensif dilakukan serta hubungan serta kerja sama yang baik dilakukan sehingga partisipasi masyarakat aktif dalam setiap proses dan pengawasan pilkada serentak 2020 di NTB.

Tujuan Bawaslu yaitu Memastikan TPS AKSES mudah dijangkau, Memastikan bahwa surat suara tersedia untuk pemilih penyandang disabilitas serta Bagaimana prosesur untuk pemberian hak pilih dapat dilakukan ketika surat suara tidak tersedia.

## 2. Pemilihan Serangkaian Tindakan

Pemililihan serangkaian tindakan meliputi: perencanaan strategis yang optimal serta implementasi strategi yang terukur. Kegiatan pelaksanaan strategi yang tidak optimal dapat berdampak signifikan terhadap hasil yang diinginkan. Selain itu, dalam tahap pemilihan tindakan, penting untuk memastikan kesesuaian dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Dalam pemilihan serangkaian tindakan bawaslu menetapkan jumlah pemilih penyandang disabilitas ini berguna agar lebih akurat dalam mendapatkan pelayanan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa total jumlah keseluruhan persebaran penyandang disabilitas yang tersebar di Provins NTB pada Tahun 2019-2020 sebanyak 24138 Jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih pada pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB sebanyak 4853 Jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

kemudian juga Bawaslu NTB merancang dan melaksanakan program dan kebijakan dalam meningkatkan Kualitas Pengawasannya Dalam Hal Pelayanan Bagi Kelompok Disabilitas Pada PILKADA Serentak 2020 Di NTB. Diantaranya Audiensi dengan kelompok penyandang disabilitas, Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bagi kelompok penyandang disabilitas, Forum Warga Pengawasan Partisipatif.

Strategi pencegahan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan mencakup peningkatan edukasi pemilih, penerapan sanksi tegas, pengawasan ketat oleh lembaga independen, pemanfaatan teknologi untuk deteksi kecurangan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat.

### 3. Alokasi Sumber Daya

Pada masa pandemi COVID-19 Bawaslu Provinsi NTB dituntut untuk bekerja dengan metode baru serta tetap bersemangat dalam berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. .

Pandemi covid-19 termasuk dalam keadaan yang cukup sulit untuk dilakakukan pengawasan. Tidak jarang masyarakat mengabaikan protokol kesehatan sehingga menuntut bawaslu menciptakan solusi berbasis teknologi melalui Aplikasi Gowaslu dan Siswaslu.

Gowaslu adalah aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran selama pemilihan serentak tahun 2020. Masyarakat bisa berpartisipasi langsung untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Hal serupa juga berlaku terhadap pemilih penyandang disabilitas.

Sedangkan SIWASLU adalah sebuah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum yang berfungsi sebagai perangkat teknologi untuk mendukung penyampaian informasi dalam rangka mengawasi proses serta hasil dari pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.

#### **Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Bawaslu NTB dalam Mengawasi Kualitas Pelayanan Kelompok Disabilitas Pada PILKADA Serentak 2020 Di NTB**

Faktor Komunikasi: Keterbukaan Informasi ,Bawaslu NTB menyelenggarakan program sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang ditujukan kepada kelompok penyandang disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam proses pengawasan pemilu. Sosialisasi ini bertujuan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat terlibat secara aktif dan setara dalam kegiatan pengawasan pemilu, serta memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu.

Bawaslu NTB juga menginisiasi Forum Warga Pengawasan Partisipatif, sebuah wadah masyarakat yang terdiri dari kelompok yang memfokuskan perhatian pada pengawasan Pemilu. Forum ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Faktor Kerja sama, Bawaslu NTB menegaskan pentingnya pelayanan bagi penyandang disabilitas untuk menjamin partisipasi yang adil dalam proses demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang fokus pada isu-isu disabilitas.

Faktor Sumber Daya: Kualitas Sumber Daya, Kualitas sumber daya manusia sangat krusial untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu yang efektif dan

kredibel. Pernyataan di atas selaras dengan yang disampaikan oleh Itratif selaku Pimpinan Bawaslu NTB mengenai penyesuaian kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan bawaslu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan

Berdasarkan kriteria diatas bawaslu NTB menentukan indikator- indikator dari kriteria meliputi: Kompetensi Profesional, Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah, Komunikasi Efektif, Pemahaman Teknologi Informasi, Keterampilan Manajemen, Komitmen terhadap Peningkatan Kapasitas, Dedikasi dan Disiplin serta Pemahaman Sosial dan Budaya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan tentang strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di NTB sebagai berikut:

Strategi Badan Pengawas pemilu dalam mengawasi kualitas pelayanan terhadap kelompok disabilitas pada pilkada serentak 2020 di NTB dapat dilihat dari 3 aspek yaitu formulasi jangka panjang, pemilihan serangkaian tindakan, dan alokasi sumber daya. Formulasi jangka panjang dari bawaslu NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada pilkada serentak 2020 di NTB dapat dilihat dari potensi peluang dan risiko yang ditemui oleh bawaslu ntb. Keberhasilan bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya dapat dilihat dari minimnya pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada. Serta kualitas sumber daya bawaslu ntb yang memadai. Dalam pemilihan serangkaian tindakannya terdapat perencanaan dan optimalisasi perencanaan strategi oleh bawaslu ntb. Salah satunya menjalin kerja sama dengan organisasi kelompok penyandang disabilitas seperti PPDI (Persatuan penyandang disabilitas Indonesia Provinsi NTB, PPUAD (Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas) Provinsi NTB serta organisasi masyarakat lainnya. Bawaslu NTB berkewajiban menyusun strategi baik dari program dan kebijakannya dalam meningkatkan kualitas pengawasan dalam hal pelayanan bagi kelompok disabilitas pada pilkada serentak 2020 di NTB.

Bawaslu NTB melakukan audiensi dengan kelompok disabilitas. Audiensi dinilai efektif untuk mengetahui berbagai keluhan yang dialami masyarakat dengan penyandang disabilitas sehingga ditemukan solusi pemecahannya. Kemudian juga bawaslu ntb melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif serta berinisiasi membangun forum warga pengawasan partisipatif. Bawaslu menyadari disamping menyusun strategi pengawasannya bawaslu juga telah menyusun strategi pencegahan terhadap pelanggaran disetiap pemilu dan/atau pilkada mencakup peningkatan edukasi pemilih, penerapan sanksi tegas, pengawasan ketat oleh lembaga independen, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi kecurangan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat.

Keberhasilan Bawaslu NTB dalam mengalokasikan sumberdayanya dapat dilihat dari inovasi bawaslu dalam penerapan teknologi yang dilakukan Pada pilkada serentak 2020 di ntb.

Pada masa pandemi covid-19 bawaslu ntb dituntut untuk bekerja dengan metode baru, mencari solusi yang efektif. Gowaslu dan Siwaslu merupakan Aplikasi yang diluncurkan oleh Bawaslu. Aplikasi ini dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran selama pemilihan Pilkada serentak 2020. Siswaslu merupakan sebuah sitem pengawasan pemilihan Umum yang berfungsi sebagai perangkat teknologi untuk mendukung penampaian informasi dalam rangka mengawasi proses serta yasil pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu.

Faktor yang mempengaruhi strategi Bawaslu NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada Pilkada serentak 2020 di NTB yaitu keterbukaan informasi, kerja sama, dan kualitas sumber daya. Keterbukaan informasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi strategi bawaslu NTB dalam mengawasi kualitas pelayanan kelompok disabilitas pada pilada serentak 2020 di NTB. Adanya sosialisasi terkait pentingnya hak politik terhadap penyandang disabilitas penting dilakukan.

Penyandang disabilitas harus terlibat aktif dalam menyuaeakan hak politiknya sebagai warga negara. Kemudian juga pembentukan forum warga pengawasan partisipatif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi strategi dari bawaslu ntb. Bawaslu NTB menegaskan Pentingnya menjamin partisipasi yang adil dalam proses demokrasi terhadap penyandang disabilitas diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai orgaisasi lembaga yang fokus pada isu-isu disabilitas.

Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stratgi bawaslu dalam mengawasi kulitas pelayanan terhapa penyandang disabilitas pada proses pilkada. Bawaslu NTB mengedepankan kualitas sumberdayanya dapat dilihat dari ketentuan yang diterapkan oleh bawaslu ntb meliputi kompetensi profesional, kemampuan analisis dan pemecahan maslah, komunikasi efektif, pemahaman teknollogi informasi. Keterampilan manajemen, dedikasi dan disiplin serta pemahaman sosial budaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abiyasa, P. (2019). KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA SEMARANG SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU. In Tahun (Vol. 2, Issue 2).
- Anwar, A. H. (2019). Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu Role of Bawaslu in Law Enforcement and Election Justice.
- Andayani, S., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram. *Journal Law and Government*, 2(1), 8-19.

- Budiyono, H. A., & Fatmawati, E. (2019). Pemanfaatan Facebook sebagai Media Promosi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informas*, 8(1), 47–59.
- Darojat, O. (2017). "TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU MASYARAKAT. Universitas Terbuka Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan. [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)
- Dedi, A., & Sudarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 14–28.
- Febriana, N. I. (2016). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN BANK TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU TULUNGAGUNG. 03(01).
- Fitri Anggreani, T. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Swot: Strategi Pengembangan Sdm, Strategi Bisnis, Dan Strategi Msdm (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(5), 619–629. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i5.588>
- Hernimawati, H., Asyar, Y., Faridhi, A., & Yandra, A. (2019). Prinsip-Prinsip Berdemokrasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 Di Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(1), 11. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i1.7802>
- Ida Wibowati, J. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT MUARAKATI BARU SATU PALEMBANG. *Jurnal Adminika*, 7(1).
- Ja'far, M. (2018). EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILU. In Juni (Vol. 2, Issue 1).
- Juliansyah, E. (2017). Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomak*, 3(2), 19–37.
- Ladiqi, S., & Wekke, I. S. (2018). GAMBARAN DEMOKRASI: Demografi, dan Perkembangan. <https://www.researchgate.net/publication/344207714>
- Lutpiani, E. (2019). IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA.
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Makassar. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(1), 120–128. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i1.33>
- Nurindarwati, R. (2020). Penerapan Supervisi Akademik Pengawas Upaya Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Penyusunan Administrasi Pembelajaran. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(1), 14–34. <https://doi.org/10.52802/amk.v8i1.177>
- Oktaviana, M. (2020a). STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MATARAM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.

- Oktaviana, M. (2020b). STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MATARAM UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS “(Studi Kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019).
- Panala, O. R. (2021). PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA 2021-2024 (STUDI TENTANG PENGAWASAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19). 2021(3), 225–236.
- Pangestu, F. P. (2022). PENGAWASAN PERGUDANGAN DI KOTA MAKASSAR. Unismuh, 3. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Pawestri, A. (2017). HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN HAM NASIONAL (Vol. 2, Issue 1). <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu>
- Qadariah, M. (2020). Demokrasi Negara Melalui Gerakan Indonesia Baru.
- Riani, N. K. (2021). STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. 1(11). <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/penge>
- Rianto, A. (2018). PELAYANAN PUBLIK DALAM KONTEKS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif (Vol. 17, Issue 33).
- Sanjaya, P. (2018). Pentingnya sinergitas keluarga dengan sekolah melaksanakan strategi dalam pembelajaran. Widyacarya, 2(2), 34–41. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/widyacarya/article/viewFile/97/90>
- Sholecha, N. (2022). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LUMAJANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA TAHUN 2018 BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2018.
- Sirait, B. C. (2013). PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA PILKADA SUMATERA UTARA 2013 DI KOTA MEDAN.
- SIREGAR, A. A. R. (2019). KEWENANGAN AJUDIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH. Paper Seminar Nasional Pemilu.
- Surbakti, A. R., & Fitrianto, H. (2015). Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- Sururama, R. (2020). PENGAWASAN PEMERINTAHAN. Cendekia Press.
- Susanti, M. H., & Setiajid, D. (2020). PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK KOTA SEMARANG TAHUN 2020. <https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.49>
- Wulansari, R. A. (2023). STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM MENGOPTIMALKAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2024.

- Zitri, I., Amil, A., & Lestanata, Y. (2024). Policy Communication on Twitter Social Media: Development of Sustainable Tourism Destinations in West Nusa Tenggara. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 34-43.
- Zitri, I., Rifaid, R., Lestanata, Y., & Kurniawan, C. (2024). Navigating digital tourism governance: a case study of branding strategies in the Mandalika special economic zones. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 148-159.
- Zitri, I., Gushadi, A., & Subandi, A. (2023). Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat: Implementasi Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Journal Of Social And Policy Issues*, 113-120.
- Zitri, I., Lestanata, Y., & Pratama, I. N. (2020). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Toursm) (Studi Kasus Pulau Kenawa Di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat). *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2).
- Zitri, I., Lestanata, Y., Darmansyah, D., Amil, A., & Umami, R. Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste Di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 107-119.